

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh aktor tertentu sesuai dengan kepentingannya dan ada beberapa kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Awalnya pembahasan dan aktor dalam menjalin hubungan menjalin suatu hubungan dengan negara lain cenderung *High Politic* dan tertutup. Hubungan Internasional adalah studi mengenai pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit pemerintah (Coulombis dan Wolfe, 2004: 24).

Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

“Studi Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan keharusan sebagai akibat saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya negara yang menutup diri dari dunia luar“ (Perwita & Yani, 2005, 3-4).

Menurut McClellan dalam buku *The Dictionary of World Politics*, mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, di mana di dalamnya terdapat studi tentang keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Baik yang dilakukan oleh negara ataupun non-negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian

Politik Luar Negeri dan Politik Internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia (Perwita dan Yani, 2005:4).

Mas'ood (2002: 29) di dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara ataupun aktor non-negara dalam area internasional. Perilaku itu dapat berwujud konflik, kerjasama, dan sebagainya“.

Hubungan Internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama masalah politik. Seiring dengan perkembangan zaman pun isu-isu internasional mengalami perubahan. Para aktor negara ataupun non-negara mulai menunjukkan ketertarikan kepada isu-isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan kebudayaan (Hadiwinata, 2007: 5).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah salah satu aspek dalam hubungan internasional. Suatu perwujudan di mana kondisi masyarakat saling bergantung satu sama lain. Dalam melakukan Kerjasama butuh suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuan dari Kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk dari berbagai aktivitas internasional yang meliputi bidang ideologi, politik sosial, ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, dan pertahanan. Isu utama Kerjasama internasional berdasarkan sejauh mana keuntungan Bersama yang diperoleh oleh kedua pihak atau lebih melalui Kerjasama tersebut, dan dapat mendukung konsepsi dari kepentingan Tindakan unilateral dan kompetitif. Karena suatu Kerjasama internasional bertemu

berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

Dalam suatu Kerjasama internasional, berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai bangsa dan negara yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang merupakan aspek dalam hubungan internasional. yang menjadi hal utama dari Kerjasama internasional adalah berdasarkan pada sejauh mana keuntungan Bersama yang diperoleh dari Kerjasama tersebut, sehingga dapat mendukung konsepsi dari unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang-bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005. 33-34).

Kerjasama internasional menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara maupun aktor-aktor internasional. adanya ketergantungan di antara aktor-aktor internasional menyebabkan perlunya melakukan suatu Kerjasama antar aktor untuk memenuhi kepentingan nasional.

2.1.3 Diplomasi

Menurut Jack Plano dan Roy Olton (Darmayadi, Mulyana, Triwahyuni, dan Putri, 2015: 56):

“Diplomasi telah menjadi suatu bagian penting dalam kehidupan bernegara dan juga menjadi sebuah sarana utama untuk menangani isu-isu internasional agar dapat mencapai perdamaian dunia. Dimana diplomasi ditujukan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah negara dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah negara lain serta merupakan taktik pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Di mana diplomasi juga mencakup seluruh proses luar negeri, serta pelaksanaannya.”

Diplomasi secara etimologis, berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*Diploun*”.

Kata “Diploma” lebih dekat artinya dengan duplikasi yang berarti menggandakan atau melipat dua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia, diplomasi berarti urusan dalam penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain, atau urusan kepentingan sebuah negara dengan perantara wakilnya membina hubungan antar satu negara dengan negara lain (Shoelhi, 2011: 74).

Diplomasi dalam dunia politik mengacu pada proses komunikasi antara aktor-aktor internasional melalui negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Diplomasi merupakan praktik dalam komunikasi antarnegara dan implementasi dari kebijakan luar negeri dari suatu negara. Dalam diplomasi, penerapan taktik dan kecerdasan merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan diplomasi. Keduanya dirangkai menjadi konsep strategi diplomasi (Shoelhi, 2011: 76).

Dalam artian klasik, diplomasi berfungsi Adapun fungsi diplomasi adalah sebagai berikut (Shoelhi, 2011: 85-86):

a. *Reporting*

Fungsi pelaporan (*reporting*) adalah melaporkan perkembangan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagian yang terjadi di negara akreditasi dan mengkomunikasikan informasi penting lain yang perlu diketahui negara akreditasi. Dalam konteks ini, seorang diplomat dituntut untuk bekerja sungguh-sungguh dalam memantau perkembangan yang terjadi, khususnya untuk menangkap peluang-peluang menguntungkan yang bisa dimanfaatkan.

b. *Representation*

Sebagai wakil resmi negaranya, seorang diplomat yang mewakili dan memeragakan keresmian negaranya di hadapan sesama utusan diplomatic di negara akreditasi. Diplomat mewakili negaranya dalam upacara-upacara kenegaraan serta pertemuan-pertemuan resmi; penganugerahan bintang-bintang jasa/kehormatan, dan acara-acara resmi kenegaraan lainnya, berpenampilan dengan pakaian-pakaian resmi serta peduli terhadap tata krama serta tata cara diplomatic.

c. *Negotiation*

Fungsi perundingan. Diplomat berperan sebagai pembawa pesan (*messenger*), senantiasa bertindak instruksi yang diberikan negaranya. Kendati demikian, ia juga harus mengerahkan kemampuannya,

mempergunakan wewenang dan tanggung jawabnya untuk memenangkan negosiasi.

Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalin hubungan resmi antar pemerintahan yang berdaulat dan kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya.

Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan:

“Diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Di mana negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lainnya berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi (*lobby*), kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lain yang terkait” (Djelantik, 2008: 3-4).

Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, diplomasi juga dapat terjadi di dalam kondisi konflik bersenjata atau perang. Hal ini dikarenakan tugas utama dari diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan melakukan persuasi terus menerus. (Djelantik, 2008: 4).

Definisi paling dekat adalah diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi. Dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi (Djelantik, 2008: 4).

Diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi berupaya untuk mengubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomat melalui persuasi,

menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi, atau mengirimkan ancaman.

2.1.4 Paradiplomasi

Paradiplomasi (*Paradiplomacy*) adalah kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh “*sub-state*” atau pemerintah regional atau pemerintah daerah suatu negara. Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, institusi politik dan kebijakan politik suatu pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk nyata dari implementasi kebijakan public (Michelmann, 2009:177).

Menurut Berridge & James (2003: 199) menyatakan bahwa paradiplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan dalam ruang lingkup internasional yang membawa tujuan politis dari aktor sub-nasional dalam suatu pemerintahan.

Joseph Nye menjelaskan hubungan trans-nasional merupakan interaksi yang melewati tapal batas negara di mana di dalamnya terdapat lebih dari satu aktor-aktor non-negara, interaksi aktor-aktor non-negara yang melewati negara tersebut dapat berupa pemerintah daerah maupun provinsi, organisasi internasional, maupun perusahaan multinasional, yang termasuk paradiplomasi (Nye, 2000: 2).

Dalam hal ini, aktor-aktor sub-negara yang secara tradisional adalah pemerintahan regional atau lokal yang bertindak sebagai aktor dalam negeri.

Namun, pada era transnasional, pemerintah regional juga melakukan interaksi yang melintasi batas-batas negara mereka dan dalam taraf tertentu, mereka juga Menyusun kebijakan Kerjasama luar negerinya, yang dalam beberapa kasus, tidak selalu berkonsultasi dengan pemerintah pemerintah pusat. Fenomena pemerintah regional membangun hubungan internasional sangat Nampak di negara-negara industri maju di Barat (Mukti, 2013: 38).

Besarnya peran aktor-aktor non-negara terhadap perkembangan suatu negara menjadikan perlunya pemerintah untuk melakukan pendekatan dan membantu aktor non-negara lebih mendalam demi terciptanya integritas Bersama.

2.1.5 Sister City

“*Sister City* merupakan kerangka Kerjasama jangka panjang antara 2 daerah/kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian, dan atau prefektur di dua negara berbeda. Hubungan ini secara resmi diakui setelah pejabat resmi/tertinggi terpilih atau ditunjuk dari kedua kota/daerah menandatangani perjanjian untuk menjadi *Sister City*” (<https://www.sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/> diakses pada tanggal 04 Mei 2021).

Melalui paradiplomasi yang dilakukan pemerintah daerah, terdapat Kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu berupa Kerjasama dalam membuat suatu kota kembar atau *sister city* dan tingkat provinsi bernama *sister province*. *Sister City* merupakan suatu konsep Kerjasama antara dua kota yang secara geografis dan politik serupa dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar-budaya dan individu. Istilah *Twin Town* ini, walaupun bukan keharusan, seringkali memiliki demografis dan

karakteristik yang sama. Konsep ini bisa juga digambarkan sebagai sebuah bentuk “sahabat pena”, hanya saja di sini yang berhubungan adalah kota dengan kota di negara yang berbeda (Sinaga, 2010: 31).

Kerjasama *Sister City* merupakan hubungan formal antara pemerintah kota maupun pemerintah local lainnya yang mempunyai kedudukan setara yang melewati batas negara. Tetapi, *Sister City* sendiri dapat berupa hubungan antara negara dengan kota yang tujuannya terhubung pada tujuan-tujuan internasional (O’toole, 2001: 19).

Kerjasama *Sister City* dapat terbentuk karena adanya persamaan kedudukan dan status administrasi, persamaan luas wilayah, persamaan karakteristik sosio-kultural, dan topografi kewilayahan, persamaan isu-isu yang dihadapi, dan komplementaritas antara kedua pihak dengan tujuan membangun Kerjasama dalam hubungan barang dan jasa.

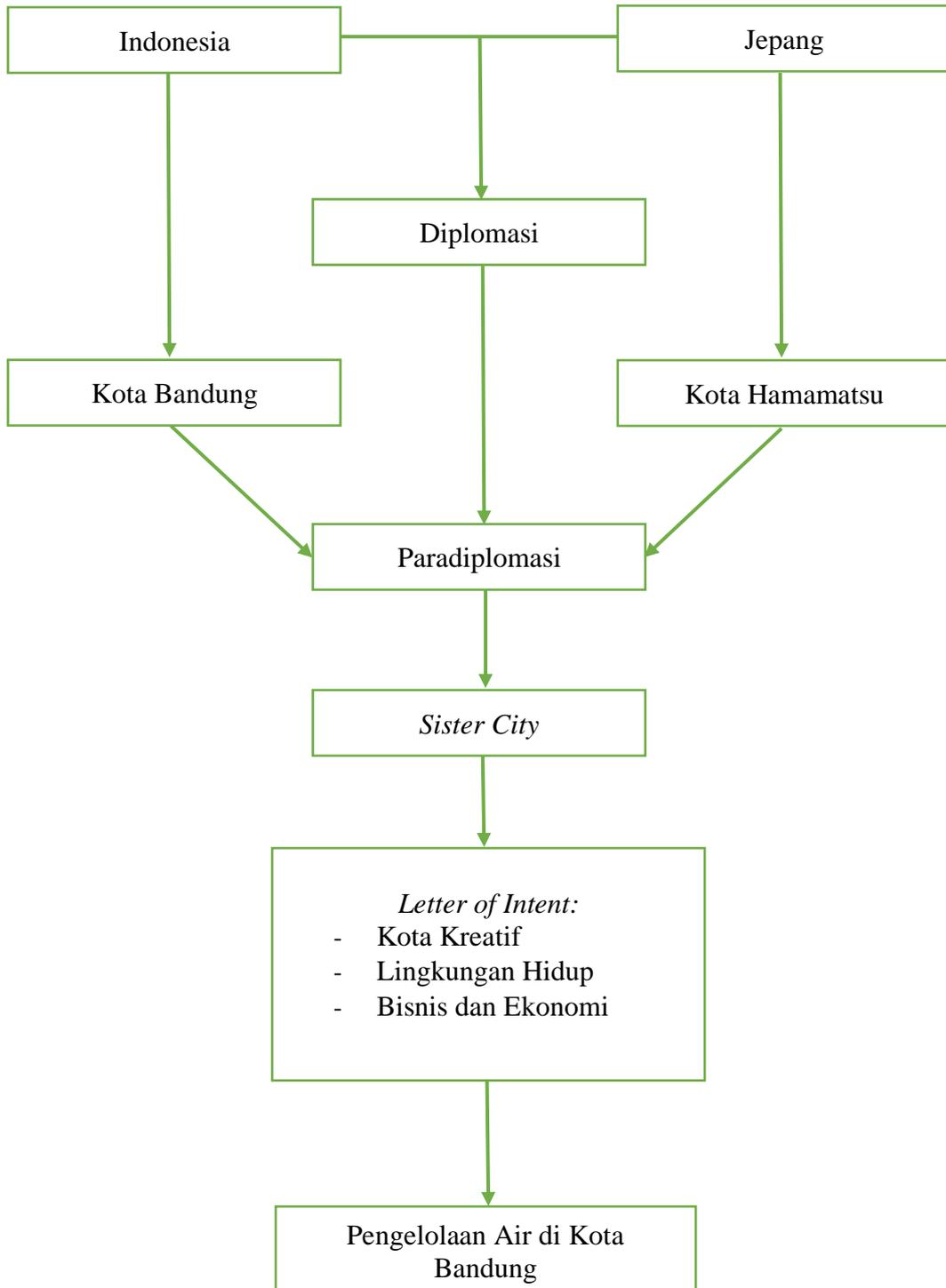
2.2 Kerangka Pemikiran

Setiap negara di dunia pasti akan menjalin interaksi hubungan dengan negara lain. Hal ini dipicu karena rasa saling membutuhkan untuk memnuhi kepentingan nasional. Hubungan diplomasi yang terjalin antara Indonesia dan Jepang sudah dibuka sejak tahun 1958 dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Hingga saat ini pun, Indonesia dan Jepang sudah banyak melakukan Kerjasama di berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, sosial, Pendidikan, politik, maupun pertahanan dan keamanan.

Hubungan diplomasi antara Indonesia dan Jepang hingga saat ini bisa terbilang baik. Kedua negara mempunyai peran dan pengaruh yang penting di Kawasan masing-masing. Indonesia dan Jepang juga merupakan negara-negara yang tergabung dalam organisasi G20 dan APEC. Kedekatan antara Indonesia dan Jepang juga ditandai dengan Jepang menjadi salah satu mitra ekspor terbesar Indonesia dan juga Jepang yang menjadi donor utama bantuan pembangunan di Indonesia.

Melalui paradiplomasi yang dilakukan antara daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan daerah-daerah di Jepang. Salah satu bentuk paradiplomasi yang dilakukan adalah skema *sister city* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Hamamatsu. Kerjasama internasional antara Kota Bandung dan Kota Hamamatsu sudah banyak dilakukan di berbagai bidang seperti kebudayaan, Pendidikan, dan pengelolaan air. Bidang pengelolaan air melalui Kerjasama pencegahan kebocoran pipa air di Kota Bandung. Bagi Pemerintah Kota Bandung Kerjasama ini diharapkan agar Kota Bandung dapat mendapat pengetahuan dan wawasan lebih mengenai pengelolaan air dari Kota Hamamatsu, Jepang. Untuk kepentingan Kota Hamamatsu juga Kerjasama ini sebagai cara mengenalkan budaya Jepang di Kota Bandung, Indonesia dan menjaga hubungan diplomasi dan Kerjasama dengan Indonesia.

MODEL KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.1 Model Kerangka Penelitian

Sumber: Diilustrasikan oleh peneliti